

Analisis Penerapan Akutansi Pajak Daerah Berbasis Akrua Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Jayapura

Entis Sutisna [✉], Entar Sutisman², Jana Siti Nor Khasanah³

^{1,2} Universitas Yapis Papua

³ IAIN Fatthul Muluk Papua

Abstrak

Salah satu tahapan terpenting dalam siklus APBN adalah Pelaksanaan Anggaran. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan membuat sebuah kebijakan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) dengan menggunakan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa pengaruh kompetensi SDM, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja (satker) lingkup wilayah pembayaran KPPN Samarinda dalam pengelolaan APBN. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 261 satuan kerja yang dilayani oleh KPPN Samarinda, dan sampel yang digunakan sebanyak 73 responden. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan menggunakan data sekunder yaitu nilai IKPA yang berasal dari aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendahraan dan Anggaran Negara). Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM (X1) dan motivasi (X3) secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Sedangkan variabel lingkungan kerja (X2) secara parsial memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Secara simultan ketiga variabel kompetensi SDM (X1), lingkungan kerja (X2), dan motivasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci: *Kompetensi SDM, Lingkungan Kerja, Motivasi, Kinerja Pelaksanaan Anggaran.*

Abstract

One of the most important stages in the APBN cycle is Budget Implementation. To measure the quality of budget implementation, the Ministry of Finance made a policy to assess the performance of budget implementation of Ministries / Institutions or Work Units (Satker) using the IKPA (Budget Implementation Performance Indicator) value. The purpose of this study was to analyze the effect of HR competence, work environment, and motivation on the performance of budget implementation in the work unit (satker) within the scope of the Samarinda KPPN payment area in managing the state budget. The population in this study were 261 work units served by KPPN Samarinda, and the sample used was 73 respondents. This study uses primary data, namely data derived from questionnaires distributed to respondents to be filled in and uses secondary data, namely IKPA values derived from the OMSPAN application (Online Monitoring of State Treasury and Budget Systems). The data obtained is then analyzed using Multiple Linear Regression. The results of the regression analysis show that the HR competency variable (X1) and motivation (X3) partially have a

positive and significant effect on budget execution performance. While the work environment variable (X2) partially has a positive but insignificant effect on budget execution performance. Simultaneously, the three variables of HR competence (X1), work environment (X2), and motivation (X3) have a positive and significant effect on budget execution performance.

Keywords: *HR Competencies, Work Environment, Motivation, Budget Implementation Performance.*

Copyright (c) 2023 Entis Sutisna

□ Corresponding author :

Email Address : pacesutisna@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era seperti sekarang ini, Di era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan di berbagai daerah dituntut agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya transformasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan begitu Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengembangkan daerah masing-masing dan juga dalam hal menyediakan pelayanan terhadap publik. Beberapa fenomena mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian keuangan mencatat adanya fenomena tidak sehat dalam keuangan pemerintah daerah, mayoritas daerah terlalu mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai operasional birokrasi. dalam struktur APBD di banyak daerah, banyak yang tergantung transfer pemerintah pusat, bisa sampai 80 persen. Menurut PSAP No.07 pasal 02 standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dalam pelaporan keuangan. Kesiapan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah tentunya akan sangat berdampak besar pada perubahan dalam pelaporan keuangan Pemerintah. Untuk itu dibutuhkan kesiapan yang matang baik dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi di seluruh Provinsi, Kota / Kabupaten (Saerang dan Winston, 2016). Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber perolehan daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

METODOLOGI

Dalam penelitian deskriptif proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di (Sugiono 2008: 90) bahwa analisis telah dimulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil penelitian. Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Maleong, 2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni proses mengumpulkan dan menyusun secara baik data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter serta berbagai bahan lain yang tentunya berkaitan dengan analisis penerapan akuntansi pajak daerah pada badan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kota Jayapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Sistem Akuntansi Pajak Daerah Berbasis AkruaI yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung dan data pungutan pajak kota Jayapura dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Adapun, yang menjadi informan diantaranya kepala sub bagian akuntansi, kepala sub bagian perencanaan, dan kepala sub bagian pelaporan. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Jayapura. Penerapan akuntansi berbasis akruaI dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akruaI dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. System informasi keuangan daerah yang digunakan di badan pengelolaan keuangan dan barang daerah kota Jayapura ialah system informasi keuangan daerah atau di singkat SIMDA. Aplikasi SIMDA Keuangan sebagai alat bantu (tools) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang saat ini telah banyak diimplementasikan di pemerintah daerah dan system tersebut mulai digunakan sejak bulan agustus tahun 2017.

Pembahasan

Sebelum diterapkannya sistem Pajak Berbasis AkruaI pada tahun 2015 Setiap Kantor Pajak Daerah menggunakan sistem pajak berbasis Cash. Sistem pajak berbasis kas yang mana setiap transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan cash basic konsepnya juga berdasarkan pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya.

Keunggulan dari Sistem Pajak Berbasis Cash:

1. Pendapatan belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitung pendapatan.
2. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas secara real
3. Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut

Tabel 1. Contoh perbedaan basic cash dengan basic akrual :

Transaksi	Basic cash	Akrual basic
penerimaan	Pendapatan diakui pada saat diterima dana kas / bank	Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan diterimanya dana pada kas / bank
pengeluaran	biaya diakui pada saat dibayar secara kas / bank	Biaya diakui pada saat transaksi tanpa melihat dibayar langsung secara kas / bank

Contoh perbedaan basic cash dengan basic akrual dalam pencatatan keuangan adalah sebagai berikut :

PT Javafood menjual barang berupa mie instant dan mengirimkannya kepada pelanggannya, PT Sukajaya pada tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp 3.600.000. PT Sujaya membayar pembelian mie instant tersebut pada PT Javafood dua minggu kemudian, yaitu pada tanggal 17 Juni 2016. Maka pencatatannya sebagai berikut :

(A)pada basic akrual meskipun uang belum diterima sudah dicatat dan dalam pembukuan :

accrual basis:

3/6/16 Kas 3.600.000

Pend Piutang 3.600.0000

(B)pada basic cash pemasukan dicatat setelah menerima secara real :

cash basis :

17/6/16 Kas 3.600.000

Pendapatan 3.600.0000

Sedangkan untuk kelemahan pencatatan Akutansi secara Cash basic sendiri tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia sehingga dapat enurunkan perhitungan pendapatan karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterianya uang kas serta adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.

Sehingga pada tahun 2015 Pemerintah negara republik indonesia menerapkan sistem pajak berbasis akrual yang tertuang *dalam Undang Undang 256 / PMK.05/ 2015 Tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.*

Sistem pajak berbasis akrual sendiri memiliki fitur pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benar benar diterima atau dikeluarkan. Sehingga Basic Akruwal adalah basic akutansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi Tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basic Cash juga konsepnya berdasarkan dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya termasuk piutang. Keunggulannya sendiri digunakan untuk mengukur aset, kewajiban dan ekuitas dana serta beban diakui saat terjadinya

transaksi, piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung dalam estimasi piutang tak tertagih dan hasil laporan keuangan dapat dijadikan pedoman Kantor pajak daerah dalam menentukan kebijakan kebijakan pada tahun berikutnya serta adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih yang dapat mengurangi resiko kerugian. Akan tetapi untuk kelemahannya dalam basic akrual adalah adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan serta pembentukan cadangan kas juga dapat mengurangi pendapatan, Informan 1 mengatakan :

“Sebelumnya kita menggunakan Basic kas dan setelah basic kas kita menggunakan semi basic kas, kalau basic kas ini kita mengakui suatu pendapatan ketika uang itu masuk dikas daerah kalau diakruaI sudah diakui sebagai pendapatan jika sudah dikeluarkan ketetapan walaupun uang tersebut belum masuk di kas pemda, kalau dari sisi akrual dalam belanja ketika ada kewajiban itu sudah diakui, bedanya di basic kas diakui sebagai belanja ketika uang itu keluar dari kas daerah. Untuk Sistemnya sendiri semuanya punya sisi bagusnya sehingga tidak serta merta basic kas itu tidak digunakan contohnya laporan arus kas masih menggunakan basic kas kalau untuk laporan operasional sal berbasis akrual.”

Dalam **PP No.71 Tahun 2010** yang didukung dengan disahkannya **Permendagri no.64 Tahun 2013** tentang **penyajian laporan keuangan berbasis**, maka transaksi yang akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal yaitu :

- a) **Jurnal Finansial** untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja , rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran
- b) **Jurnal Anggaran** yang mencatat seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional.

Untuk kendala yang dialami pada penerapan sistem pajak berbasis akrual sendiri lebih kepada ketidak pastian tunggakan pajak dibayarkan dikarenakan pajak yang belum dibayar ikut tercatat didalam pembukuan kas. Bapak Budiman Undu menyatakan dalam wawancara bahwa dalam penerapan sistem pajak berbasis akrual tidak banyak mempengaruhi tergantung bagaimana tim jurnalis mencatat setiap pergerakan kas

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pajak Berbasis AkruaI sudah sangat baik diterapkan di Kantor Pajak Kota Jayapura, dengan adanya sistem Pajak Berbasis AkruaI tersebut dapat memudahkan petugas Kantor Pajak Daerah dan Negara dalam mencatat dan menghitung nilai setiap daerah, karena Sistem Pajak Berbasis AkruaI ini dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktifitasnya sebagai masukan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang dimiliki dan evaluasi kesesuaian penggunaan sumber daya dengan tujuan SKPD sehingga memenuhi ketercapaian tujuan dan sasaran SKPD.

Pada dasarnya Laporan Keuangan berbasis AkruaI terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca sedangkan laporan keuangan berbasis Kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Sebagian besar pendapatan

pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela, jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Jayapura dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya pajak daerah sudah sesuai dengan *PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD* untuk membukukan pajak yang diterimanya. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Berdasarkan Hasil penelitian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi pajak daerah bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Memahami konsep pendapatan pajak maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar pajak yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer public.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Jayapura perlu meningkatkan SDM yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akruwal ini dapat efektif dan efisien.

Referensi :

- Anggraeni, Dina 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD), Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatillah.
- Anggreni, Lestari Wahyu 2015. Pengaruh Efikasi Diri. Keterampilan Mengajar Guru dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar akutansi Siswa Kelas XI Akutansi SMK Ma'arif NU Talang Tegal. Semarang: Skripsi, UNNES.
- Arif, Abubakar dan Wibowo 2008, Akutansi Keuangan Dasar 2, Jakarta : PT.Grasindo.
- Budi, Prianto, 2017, Buku Pintar Pajak, Jakarta: PT.Pratama Indomitra Konsultan
- Darise, N 2008. Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT.Indeks.
- Erly, Suandy, 2005. Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat
- Helvianti. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap PAD Pada Pemerintahan Rokan Hilir Riau. Skripsi: Medan: Fakultas Ekonomi Sumatera Selatan.
- http://Wartaaceh.com/2014/03/33462/ada-Fenomena-tidaksehat-Kuangan-Pemerintah_daerah/17/03/2014.com

- Indriyawati, 2007, Pemungutan Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Kontruksi Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Di Jakarta, Skripsi : Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Intani, Rachmi, 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Skripsi : Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kaligis, Billclin dan Stanley Kho Walandouw, 2016, Analisi Penerapan Akutansi Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohou, Jurnal EMBA, Vol.4, No.3.
- Lubis, Reza Hanafi, 2017, Pengaruh Kualitas Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan, Jurnal Akutansi Dan Bisnis, Vol.3 No.1.
- Mafaza, Wildah, Yuniadi Mayowan, dan Tri Heni Saseadi, 2016, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perpajakan, Vol.11, No.1. (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan)
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi). Yogyakarta . Andi CV
- Mardiasmo, 2016 . Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta. Penerbit: Andi.
- Maylinda, Angelina, Wahyu Anitasari, Dan TopowijonoAchmad Husaini, 2016, Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar), Jurnal Perpajakan Vol.10, No.1.
- Martini, Tini dan Thamrin Rammelsbergi Janadi, 2015. Kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bandung Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonnomi Asean (MEA), Jurnal Penelitian Pendidikan.
- Manurung, Sandris Sri Rejeki, 2017, Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Peerbit Andi.
- Mardiasmo, dan Rachmat Soemitro, 2009. Perpajakan. Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta.
- Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah, Yogyakarta, FH UII Press.
- Novianti Rizka, Devi Pertiwi, dkk. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo), Jurnal Mahasiswa Perpajakan.
- Perangin - angin, Putri Agustriani, 2014, Kontribusi Penerimaan Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pertiwi, Rizka Novianti, Dei Farah Azizah, Bondan Catur Kurniawan, 2014, Analisi Efektvitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dias Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, Malang, Jurnal Perpajakan, Vol.3, No.2.
- Putranty, Mawar, 2008, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II), Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh.
- Putrianu, Eka , 2016. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Pratama, Ignatius Beny Murti, 2010, Analisi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Prikania, Hana Fairuz, 2018 , Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Perdagangan Online Di Internet, Skripsi, Medan: Uiversitas Sumatera Utara.
- Rachman, Soemitro, 1992, Pengantar Singkatan Hukum Pajak, Eresco, Bandung.
- Rappel, Warren, 2012, Wiley GAAP For Goverment 2012: Interpretation and Aplication of Generally Accepted Accounting Principles For State And Local Goverment. John Wiley & Sons.

- Saerang, Eko Yudi, 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri.
- Sunatri, regita Tias dan Hesti Lestari, 2017, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatyan Asli daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, Jurnal Of Public, And Management Review, Vol.8, No.2.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2010. Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Refika
- Aditama. Soepramo dan Damayanti, Theresia Woro 2010, Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Andi Offset.
- Sembiring, Ervina, Dr, 2011 .Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Karo, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung : Alfabet.
- Ulfah, 2007, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Hotel Terhadap PAD Pada Provinsi DKI Jakarta, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Muhammadiyah Surakarta.
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat
- Warta BPK. 2011. E-Audit Matang 2014. Jakarta : BPK RI.
- Wati, Irma, 2014, Analisis Prosedur Akutansi Penerimaan Pajak Daerah Pada PPK SKPD Dinas, Media Riset Akutansi dan Informasi, Vol.14, No.2.
- Zacky, Muchammad, 2012. Peranan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas, Skripsi, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- www.bpkp.go.id
- www.bppd.jatengprov.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.eprint.ums.ac.id
- www.jdih.kemenkeu.go.id
- www.simpeg.kemenkumhum.go.id
- Yadiani, Winwin dan Ilham Wahyudin, 2006. Pengantar Akutansi, Jakarta : Kencana Pranada Media Group. Yupukola, Kaleh Yosep dan Teguh Erawati. 2019. Pengaruh Pajak daerah Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017, Jurnal Akutansi Pajak Dewantara. Vol.1 , No.2.